



LKjIP

2021

DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN
SULAWESI BARAT

LAPORAN KINERJA INTANSI PEMRINTAH TAHUN 2021

"Mewujudkan Sulawesi Barat Maju dan Malaqbi"

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas perkenaan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 dapat terlaksana walaupun pada prosesnya dihadapkan pada berbagai hambatan.

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2022 dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Penyusunan LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2021. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat akan berupaya menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis, sehingga diharapkan di masa yang akan datang capaian semua sasaran strategis dapat lebih optimal.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas selama satu tahun di tahun yang akan datang agar dapat lebih produktif, efisien dan efektif sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Mamuju, Februari 2022
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Barat



Dr. Ir. Fadli Syamsudin, M.Sc
Pangkat : Pembina Utama / IV.e
NIP. : 196607041994121005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat selama tahun 2021 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Gubernur Sulawesi Barat. Laporan Kinerja ini telah memasuki tahun keempat pelaksanaan RPJMD Sulawesi Barat Tahun 2017-2022. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sepanjang tahun 2021, Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan telah menunjukkan perbaikan yang ditandai dengan semakin meningkatnya capaian Kinerja beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU). Namun demikian, beberapa indikator Kinerja utama masih belum tercapai atau memerlukan kerja keras untuk dapat mencapainya di tahun 2021 disebabkan pencapaiannya Indikator Kinerja Utama tersebut mengalami perlambatan.

Pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Dari 6 IKU yang telah ditetapkan, terdapat 4 IKU yang pencapaiannya telah memenuhi target dan 2 target yang capaiannya belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Uraian IKU yang capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan (capaian >100%)
 - Persentase peningkatan Nilai Tukar Nelayan per tahun di Sulawesi Barat target 100,42% tercapai 107,88%
 - Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap di Sulawesi Barat target 2% tercapai 4,09%.
 - Persentase peningkatan konsumsi ikan di Sulawesi Barat target 0,5% tercapai 0,76%
 - Peningkatan pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Barat target 5 Kawasan Tercapai 5 Kawasan
3. Terdapat 3 IKU yang capaiannya belum sesuai target yaitu:



- Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya di Sulawesi Barat target 2% tercapai 0,27%
- Persentase peningkatan olahan perikanan Sulawesi Barat target 2 % tercapai 1,5 %
- Persentasi penanganan kegiatan IUU fishing, destruktif dan pelanggaran usaha perikanan target 100% tercapai 91%

Pada tahun 2021, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat mengelola anggaran sebesar Rp 43.770.757.633 yang terbagi menjadi 6 program pembangunan. Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif atas capaian kinerja organisasi dalam menghadapi tantangan yang akan datang.

Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat yang akan berdampak positif dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi	4
C. Kelembagaan Kelautan dan Perikanan	6
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
A. Capaian kinerja Organisasi Tahun 2021.....	13
B. Realisasi Anggaran	25
BAB IV PENUTUP	29
A. Kesimpulan.....	29
B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang.....	29
LAMPIRAN.....	30



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah PNS pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, dirinci Menurut	6
Tabel 2 Banyaknya Pegawai Negeri Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Eselon	6
Tabel 3 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021	6
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Ta	9
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021	10
Tabel 6. IK Tujuan 1: Capaian Kinerja Nilai Tukar Nelayan	14
Tabel 7. Capaian IKU-1 Produksi Perikanan Tangkap	15
Tabel 8. Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Provinsi Sulawesi Barat.....	16
Tabel 9. Capaian IKU-1 Produksi Perikanan Budidaya	17
Tabel 10. Capaian IKU-2 Konsumsi Ikan	19
Tabel 11. Capaian IKU-3 Peningkatan pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Barat	22
Tabel 12. Capaian IKU-4 Persentasi penanganan kegiatan IUU fishing, destruktif dan pelanggaran usaha.....	23
Tabel 13. Jumlah kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan.....	24
Tabel 14. Capaian Jumlah Hari Operasional Kapal Pengawasan.....	25
Tabel 15. Jumlah Anggaran dan Realisasi Penyerapan Tahun 2021.....	26



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Sulawesi Barat adalah pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 pada 5 Oktober 2004, sebagai Provinsi yang ke 33 di Indonesia dengan Ibukota Mamuju. Berada pada posisi strategis, berada di antara Provinsi Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tengah. Wilayah Provinsi ini juga berhadapan langsung dengan selat Makassar, jalur lalu lintas pelayaran nasional dan internasional.

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan adalah: membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, berdaya saing, dan berkelanjutan; dan Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha dan perikanan.

Kedaulatan pengawasan terhadap pertumbuhan sumberdaya kelautan dan perikanan serta menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang sepatutnya dikembangkan yang berbasis peningkatan produksi perikanan dan pengolahan hasil perikanan.

Di antara peningkatan produksi perikanan tersebut, sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi salah satu keunggulan komparatif yang berpotensi menjadi keunggulan kompetitif untuk menggerakkan perekonomian Nasional, sehingga sudah saatnya sektor ini menjadi prioritas pembangunan Nasional.

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan menjadi semakin penting, jika dibandingkan kesuksesan beberapa negara dalam pembangunan sektor tersebut, seperti Islandia, Norwegia, Thailand, dan Korea Selatan. Berdasarkan pengalaman pembangunan kelautan dan perikanan di beberapa negara tersebut, Bangsa Indonesia sepatutnya optimis bahwa sektor kelautan dan perikanan dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, permasalahan dan kendala yang dihadapi juga cukup besar dan tidak mudah untuk diatasi. Permasalahan utama yang dihadapi antara lain :

- a) *pencemaran laut.*
- b) *erosi pantai.*



- c) pencurian ikan (*Illegal fishing*)
- d) pemboman dan pembiusan ikan
- e) degradasi habitat pesisir (*mangrove, terumbu karang, padang lamun, estuaria, dll*)
- f) konflik penggunaan ruang dan sumberdaya
- g) belum optimalnya penerapan teknologi kelautan secara memadai
- h) terbatasnya sumber permodalan yang dapat digunakan untuk investasi
- i) kemiskinan yang masih melilit sebagian besar penduduk di wilayah pesisir, khususnya pembudidayaan ikan dan nelayan skala kecil serta
- j) kurang tersedianya data dan informasi kelautan.

Permasalahan tersebut muncul antara lain sebagai akibat dari paradigma pembangunan masa lalu yang berorientasi ke darat, yang menyebabkan pengalokasian segenap sumberdaya pembangunan lebih diprioritaskan pada sektor-sektor daratan.

Akibat kondisi yang demikian, kekayaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar itu belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memecahkan permasalahan nelayan dan pembudidaya ikan serta kemiskinan di Indonesia umumnya dan Provinsi Sulawesi Barat khususnya. Apabila peluang dan prospek yang terbuka dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan permasalahan yang masih dihadapi dapat diatasi secara bertahap, maka bukan suatu pilihan yang salah jika sektor kelautan dan perikanan dijadikan andalan pertumbuhan ekonomi Nasional dimasa yang akan datang. Untuk itu perlu mendayagunakan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang kita miliki dengan menggerakkan seluruh potensi dan kemampuan serta didasari dengan kesungguhan dan kerja keras.

Isu-isu strategis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan tupoksi yang dilaksanakan selengkapny dapat dirinci sebagai berikut:

1. Bidang Perikanan Tangkap dan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

- Wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta wilayah perairan lainnya di Sulawesi Barat, dengan segala potensi dan permasalahan yang ada. Misalnya belum optimal pemanfaatannya mulai dari aspek penangkapan maupun peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelolanya.
- Penanggulangan kemiskinan yang belum optimal dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana serta kompetensi SDM yang belum memadai.
- Kondisi ekosistem seperti ekosistem terumbu karang berada pada kisaran rusak sampai kritis di semua wilayah pesisir dan ketebalan formasi mangrove yang tipis (Data Statistik

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat). Kondisi ini sangat memprihatinkan, olehnya itu diperlukan upaya maksimal dan secepat mungkin dalam mengatasi masalah tersebut, sebab bila tidak, bukan saja kita kehilangan sumber keanekaragaman plasma nutfah, ekosistem pendukung kehidupan dan penyangga sumber daya pangan, serta ancaman akan kehilangan mata pencaharian bagi nelayan.

- Jaminan keselamatan, keamanan dan kesehatan bagi nelayan belum optimal.
- Belum lengkapnya data tentang keadaan awal masyarakat (tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, keterampilan serta perilaku masyarakat) untuk mengukur tingkat kesejahteraannya;
- Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal karena berbagai proses revisi yang memerlukan waktu yang cukup lama;
- Masih tingginya biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan nelayan, produktivitas nelayan masih rendah
- Armada alat tangkap relatif masih bersifat tradisional
- Masih kurangnya alat bantu penangkapan ikan yang bersifat ramah lingkungan

2. Bidang Perikanan Budidaya

- Minimnya sarana dan prasarana budidaya
- Kapasitas SDM (pembudidaya) masih rendah
- Penanganan pascapanen yang masih konvensional dan belum stabilnya harga
- Balai benih ikan/ udang di Poniang masih butuh dukungan operasional yang lebih baik
- Dibutuhkannya balai benih ikan air tawar yang dapat memberi dukungan ketersediaan benih air tawar bagi pembudidaya

3. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

- Sarana dan prasarana penunjang pengolahan dan pemasaran yang masih terbatas;
- Masih rendahnya kualitas produksi
- Kapasitas SDM dan kelembagaan masih lemah
- Belum tersedianya depot dan sentra pengolahan produk perikanan
- Belum adanya konektivitas Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN)
- Ketersediaan sistem rantai dingin (*cold storage* dan pabrik es) belum memadai
- Belum adanya produk yang tersertifikasi standar internasional



4. Bidang PSDKP

- Masih lemahnya pengawasan terhadap illegal fishing dan Destuctive fishing. Berbagai permasalahan diperairan Sulawesi Barat diwarnai oleh aktivitas penangkapan dengan penggunaan Bom dan Bius (bahan kimia lainnya), penebangan hutan mangrove, pencemaran perairan, dan perburuan satwa laut yang dilindungi serta aspek pelanggaran tindak pidana perikanan baik dilakukan oleh nelayan lokal maupun nelayan dari luar wilayah Sulawesi Barat;
- Terbatasnya sarana prasarana pengawasan seperti kapal patroli pengawasan SDKP
- Rendahnya kesadaran masyarakat memanfaatkan SDKP secara berkelanjutan
- Belum adanya penetapan kuota dalam mengeluarkan ijin kapal perikanan
- Minimnya tenaga profesional dalam pengawasan SDKP
- Minimnya lembaga pengawas kelautan dan perikanan baik yag formal maupun yang dibentuk oleh masyarakat
- Menurunnya daya dukung lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas illegal fishing

B. Tugas dan Fungsi

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46.a Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan, Bidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Pengawasan, Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan bidang perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan tata ruang kelautan, Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Pengawasan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;



- b. Penyelenggaraan bidang urusan kelautan dan perikanan meliputi Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan tata ruang kelautan, Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Pengawasan Pengendalian Sumber daya Kelautan dan Perikanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas kelautan dan perikanan meliputi Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan tata ruang kelautan, Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Pengawasan Pengendalian Sumber daya Kelautan dan Perikanan;
- d. Pengkoordinasian dan Pembinaan UPTD;
- e. Perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan tata ruang kelautan, Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Pengawasan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- f. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan tata ruang kelautan, Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Pengawasan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang dan 2 (Dua) UPT terdiri :

1. Bidang Perikanan Tangkap dan Tata Ruang Laut
2. Bidang Perikanan Budidaya
3. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan
4. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Perikanan
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan Palipi
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih Ikan Pantai Poniang

Setiap Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi sesuai bidangnya, Sekretaris dibantu 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Program dan pelaporan.

Sebagai lembaga Pemerintah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat dalam satu tahun anggaran sebagaimana



ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

C. Kelembagaan Kelautan dan Perikanan

Tenaga dibidang Kelautan dan Perikanan merupakan pendukung utama dalam percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Jumlah dan kualitas tenaga kelautan dan perikanan seharusnya sesuai dengan kebutuhan. Jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2021 sebanyak 67 orang. Dari jumlah tersebut yang mempunyai Pendidikan S3 sebanyak 1 orang, pendidikan S2 sebanyak 12 orang; pendidikan S1 sebanyak 41 orang, pendidikan D1/D3 sebanyak 5 orang, sedangkan yang mempunyai pendidikan SMA/ sederajat sebanyak 8 orang. Dilihat dari Eselon, dari 67 orang terdiri dari Eselon IV sebanyak 20 orang, Eselon III sebanyak 6 orang, dan 1 orang Eselon II.

Tabel 1 Jumlah PNS pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, dirinci Menurut Pendidikan, Tahun 2021

OPD/Unit Kerja	Pendidikan yang ditamatkan					Jumlah
	SLTA	D1 s/d D3	D4/S1	S2	S3	
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat	8	5	41	12	1	67
Jumlah	8	5	41	12	1	67

Sumber : Data DKP Sulbar, 2021

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat memiliki SDM dengan tingkat eselon yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Banyaknya Pegawai Negeri Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Eselon pada tahun 2021

OPD/Unit Kerja	Eselon (orang)			Jumlah
	II	III	IV	
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat	1	6	20	27
Jumlah	1	6	20	27

Sumber : Data DKP Sulbar, 2021

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan biaya yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBN.

Tabel 3 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021

Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Jenis Belanja (Rp)	
		Operasi	Modal
Dinas Kelautan dan Perikanan	43.770.757.633,00	33.917.546.180	9.853.211.453

Sumber : Data DKP Sulbar, 2021

BAB. II PERENCANAAN KINERJA

Dalam Rencana Strategis Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat yang telah disusun bahwa tujuan strategis yang harus dicapai Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan. Berdasarkan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 tahun 2015, setiap Perangkat Daerah (PD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra–PD) adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) Tahun yang berfungsi untuk merencanakan perubahan kearah yang lebih baik, pengelolaan keberhasilan dan menjamin efektivitas penggunaan potensi sumberdaya untuk meningkatkan kinerja dan produktifitas organisasi.

Renstra-PD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat merujuk pada Visi, Misi serta program prioritas Kepala Daerah yang tercantum dalam dokumen RPJMD 2017-2022 yang merupakan penjabaran yang lebih detail dari pencapaian pembangunan Provinsi Sulawesi Barat, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022.

Terkait RPJMD, perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat beserta indikator kerjanya disajikan dalam lampiran.



Dalam melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan, visi pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 diarahkan untuk “Mewujudkan Sulawesi Barat Maju dan Malaqbi”.

A. Rencana Strategis

Dalam Perencanaan Strategis, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat memiliki tujuan di tahun 2021 yang didasarkan pada misi IV gubernur yaitu sebagai berikut :

“Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan”

Untuk mewujudkan tujuan yang dicapai oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, maka sasaran strategis yang dilaksanakan adalah :

1. Terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif bertanggung jawab dan berkelanjutan
2. Tersedianya pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil Sulawesi Barat
3. Tersedianya pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang profesional dan partisipatif
4. Terwujudnya Birokrasi DKP yang Efektif dan Berorientasi pada Layanan Prima

Tolak ukur pencapaian sasaran strategis dinas kelautan dan perikanan provinsi Sulawesi barat tertuang dalam indicator kinerja utama tahun 2021 sebagai berikut :

1. Persentase peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN) per tahun di Sulawesi Barat (%)
2. Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap di Sulawesi Barat (%)
3. Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya di Sulawesi Barat (%)
4. Presentase peningkatan produksi olahan perikanan di Sulawesi Barat (%)
5. Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan di Sulawesi Barat
6. Peningkatan pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Barat (Kawasan)
7. Persentasi penanganan kegiatan IUU fishing, destruktif dan pelanggaran usaha perikanan (%)
8. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DKP



B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pengertian Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara pemberi dan penerima amanah atas kinerja terukur tertentu yang telah disepakati berdasarkan tugas pokok, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia.

Perencanaan kinerja ditetapkan dalam sebuah Perjanjian Kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penetapan Kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 merupakan pelaksanaan target Kinerja tahun keempat Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator lainnya yang terkait dengan tugas fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Barat. Penetapan Kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
<i>Stakeholder Perspective</i>			
1	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan dan Kelautan	Pertumbuhan dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Per Tahun di Sulawesi Barat	1,2%
<i>Customer Perspective</i>			
2	Terwujudnya Sumberdaya Kelautan	Pengelolaan dan Produksi Perikanan Tangkap di Sulawesi Barat	2 %

Perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan	yang partisipatif dan jawab dan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Sulawesi Barat	1 %
		Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan di Sulawesi Barat	0,5%
Internal Process Perspective			
3	Tersedianya Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Cakupan Kawasan Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Sulawesi Barat	3 Kawasan
4	Tersedianya Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Profesional dan Partisipatif	Persentase Penanganan Kegiatan IUU Fishing, Destruktif dan Pelanggaran Usaha Perikanan	100%
Learning & Growth Perspective			
5	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	100%
6	Meningkatnya Pengelolaan Tata Laksana Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai SAKIP Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan	80
7	Meningkatnya Pengelolaan Data/Informasi Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan	Tingkat Dukungan Mutu Data Sektoral dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan	3 Skala Likert
8	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan	100%

Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati, untuk mewujudkan target yang tertuang dalam perjanjian kinerja tersebut terangkum dalam 12 (Dua Belas) Program pembangunan kelautan dan perikanan dengan menggunakan alokasi anggaran yang tercantum dalam DPA sebesar Rp 43.770.757.633, dengan rincian alokasi per program sebagai berikut :

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 8.353.549.251	APBD
2. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Rp. 2.029.679.630	APBD
3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp.18.300.998.238	APBD
4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 4.167.557.675	APBD
5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan perikanan	Rp. 4.848.872.475	APBD

6.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 6.997.275.110	APBD
7.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 726.640.000	APBN
8.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 441.326.000	APBN
9.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 868.680.000	APBN
10.	Program Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp. 190.750.000	APBN
11.	Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp. 158.702.000	APBN
12.	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Rp. 279.207.000	APBN
TOTAL ANGGARAN		Rp. 43.770.757.633,00	

Pelaksanaan 5 program urusan pilihan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, didukung oleh pelaksanaan kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Tujuan Program adalah mewujudkan tertatanya dan dimanfaatkannya wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari dengan sasaran peningkatan persentase pendayagunaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah pelatihan pembibitan dan penanaman mangrove, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengadaan sarana air bersih.

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Tujuan program adalah meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dengan sasaran peningkatan hasil tangkapan dalam setiap upaya tangkap. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah pengelolaan pelabuhan perikanan, pengelolaan kapal dan alat penangkapan ikan, pengelolaan sumber daya ikan, dan dukungan manajemen, pengelolaan perizinan dan kenelayanan dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

3. Program pengelolaan perikanan budidaya

Tujuan program adalah meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan sasaran program peningkatan produksi perikanan budidaya (volume dan nilai). Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah pengelolaan perbenihan ikan, pengelolaan kawasan dan kesehatan ikan, pengelolaan produksi dan usaha pembudidayaan

ikan, pengelolaan pakan dan obat ikan dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

4. Program pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan

Tujuan program adalah meningkatnya pengawasan terhadap pemanfaatan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan sasaran pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang profesional dan partisipatif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pemantauan dan operasi armada, peningkatan SDM aparat pengawas, pengembangan sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

5. Program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan

Tujuan program adalah meningkatnya produksi olahan hasil perikanan yang bernilai tambah, nilai produk hasil perikanan non konsumsi, rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional, nilai ekspor hasil perikanan, dan nilai investasi bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dengan sasaran peningkatan produk perikanan prima yang berdaya saing di pasar domestik dan internasional. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah pengembangan kelembagaan pemasaran dalam negeri sesuai standar, pengembangan pemasaran sistem rantai dingin, pameran dan bazar tingkat provinsi dan nasional, logistik hasil kelautan dan perikanan, pemasaran hasil kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan, serta dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian kinerja Organisasi Tahun 2021

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengetahui capaian kinerja dan menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun 2021 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat.

Pengumpulan dan penilaian kinerja yang akuntabel merupakan hasil evaluasi kinerja sebagai bentuk pertanggung jawaban masing-masing Organisasi perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat. Sistem pengumpulan data untuk menyusun indikator dilakukan berdasarkan pada data primer, sekunder atau melalui perhitungan statistik Perikanan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat telah menetapkan pernyataan kinerja atau kesepakatan kinerja dalam bentuk Penetapan Kinerja yang merupakan perwujudan dari target kinerja berdasarkan sumber daya dan potensi yang dimiliki sebagaimana yang telah diuraikan pada bab II. Berdasarkan penetapan kinerja tersebut, pada akhir tahun pelaksanaan kegiatan berdasarkan pagu anggaran yang telah terserap dan keluaran kegiatan dilakukan pengukuran kinerja dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada masing-masing sasaran. Untuk menilai tingkat keberhasilan kegiatan yang lebih jelas dalam laporan kinerja ini dilengkapi dengan perbandingan antara realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Adapun tujuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 sebagai berikut

Tujuan :
"Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan"

Tujuan ini memiliki 1 (Satu) indikator Persentase peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN) per tahun di Sulawesi Barat (%) perkembangan indicator kinerja tujuan adalah sebagaimana table berikut :



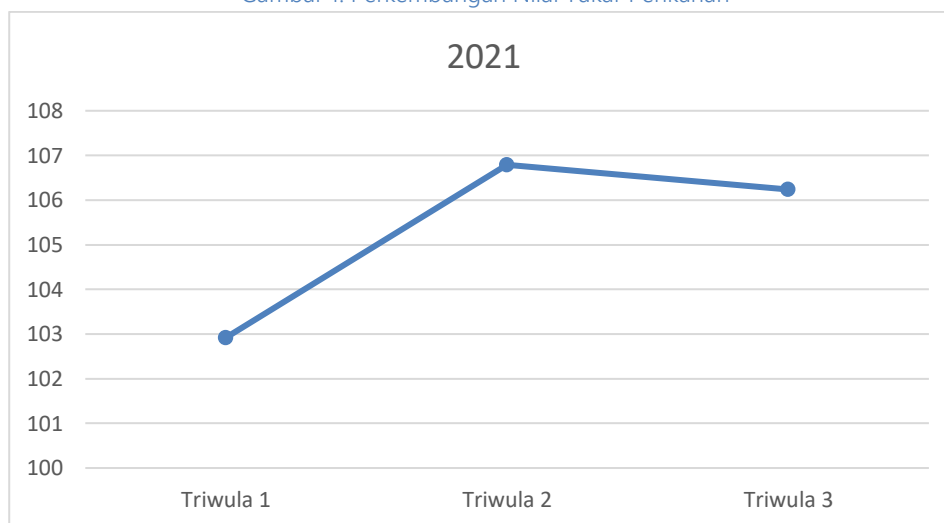
Tabel 6. IK Tujuan 1: Capaian Kinerja Nilai Tukar Nelayan

Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Target 2021	Capaian thd target 2022
117,63%	99,23%	107,88	100,42%	82,43%

NTN ini merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli nelayan, selain itu juga menunjukkan daya tukar dari produk perikanan dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTN, secara relative semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli nelayan. NTN ini menunjukkan indikator dini kesejahteraan nelayan.

Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang ditargetkan 100,42% capaian pada tahun 2021 sebesar 106.24 Capaian NTN ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 99,23%. Pencapaian nilai tukar nelayan tersebut lebih tinggi dari rata-rata nilai tukar nelayan seluruh indonesia yaitu 107,36. Peningkatan yang signifikan ini didukung oleh telah membaiknya kondisi perekonomian sulawesi barat bidang sudah membaik, daya beli masyarakat sudah mulai meningkat dan faktor produksi perikanan sudah mengalami stabilitas. NTN > 100 mengindikasikan bahwa nelayan perikanan tangkap mengalami surplus, di mana pendapatan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. NTN = 100 mencerminkan bahwa nelayan mengalami impas, pendapatan yang diterima sama dengan biaya yang di harus bayar. Sedangkan NTN < 100, artinya petani mengalami defisit, pendapatan nelayan lebih kecil dibanding biaya yang dikeluarkan.

Gambar 1. Perkembangan Nilai Tukar Perikanan



Sumber: Badan Pusat Statistik

SASARAN STRATEGIS : TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG PARTISIPATIF BERTANGGUNG JAWAB DAN BERKELANJUTAN

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 4 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap, Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap, Persentase peningkatan produksi produk olahan di Sulawesi Barat dan Persentase peningkatan konsumsi ikan di Sulawesi Barat. Jumlah hasil produksi perikanan budidaya yaitu jumlah hasil produksi perikanan budidaya yang dihasilkan oleh seluruh kabupaten/kota yang meliputi; perikanan tawar, payau, dan laut (termasuk rumput laut), sedangkan produksi Perikanan Tangkap adalah jumlah produksi yang berasal dari produksi perikanan tangkap yang terdiri dari laut dan perairan umum daratan di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat.

Capaian IKU 1: Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap di Sulawesi Barat (%)

Indikator persentase peningkatan produksi perikanan tangkap merupakan perhitungan besarnya peningkatan produksi perikanan di Sulawesi Barat pada tahun yang dievaluasi dengan sebelumnya. Persen Jumlah produksi perikanan pada tahun 2021 ditargetkan meningkat 2% telah terealisasi melampaui target yakni mengalami peningkatan sebesar 204,35%. Produksi perikanan tahun 2020 mencapai 64.181.820,00 ton dan pada tahun 2021 mencapai 66.771.143,00. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan angka NTN.

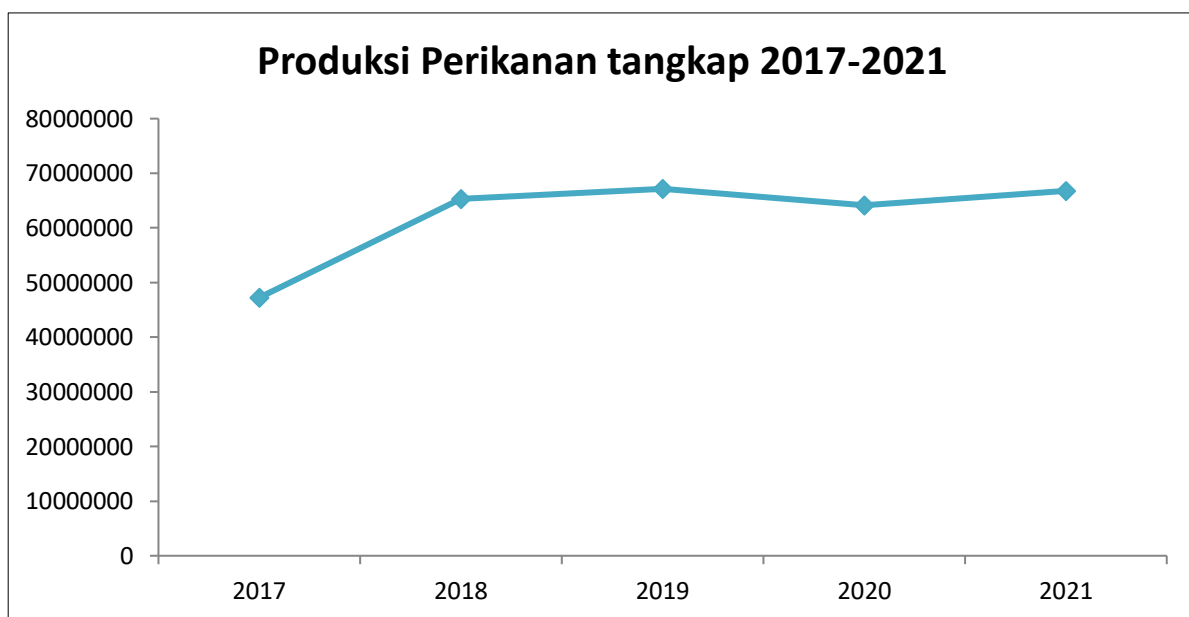
Tabel 7. Capaian IKU-1 Produksi Perikanan Tangkap

Sasaran Strategis	Terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif bertanggung jawab dan berkelanjutan					
IKU-1	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap di Sulawesi Barat (%)					
Realisasi Tahun 2020	Target	Tahun 2021		Renstra DKP (Tahun 2017-2022)		
		Realisasi	% Capaian	Target tahun 2022	Realisasi s/d Th 2022	Tingkat Kemajuan
1,8%	2%	4,09%	204,35%	5,80%	4,09	99,99

Potensi MSY (Maximum Sustainable Yield) sumberdaya ikan diketahui bahwa di wilayah Sulawesi Barat sebesar 1,026,599 ton /Tahun Terkelola 67.148,61 Ton/ Tahun. Produksi perikanan tangkap tiap tahun fluktuatif dan tidak dapat diprediksi karena dipengaruhi banyak factor salah satunya cuaca. Beberapa hal tersebut diatas menjadi pertimbangan bahwa perlu dilakukan upaya strategis untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan antara lain pemberian bantuan sarana alat penangkapan ikan (API) dan alat bantu penangkapan ikan (ABPI) yang ramah lingkungan dan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku kepada nelayan, pemulihan sumberdaya ikan di laut dengan *restocking*, dan penebaran benih ikan di perairan umum daratan

(PUD) serta memberikan bantuan pelayanan pengurusan dokumen kapal penangkapan ikan agar nelayan dapat beroperasi secara maksimal terkait sarana yang digunakan layak secara teknis dan lengkap administrasinya sehingga dapat mengurangi tindak *illegal fishing*.

Untuk memacu peningkatan volume produksi perikanan tangkap, ke depan perlu dilakukan upaya dan kegiatan antara lain Optimalisasi operasional bantuan sarana penangkapan ikan, Percepatan pembangunan, peningkatan sarana dan prasarana serta pengoperasian TPI perairan darat, Optimalisasi pendataan produksi perikanan tangkap di daerah, dan Penguatan pendataan. Potensi produksi perikanan tangkap di Provinsi Sulawesi Barat sejak tahun berjalan renstra sebagaimana terlihat pada Gambar berikut:



Gambar 2. Perkembangan Produksi (ton) Perikanan tangkap di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2018

Perkembangan produksi perikanan tangkap memiliki trend peningkatan sejak awal renstra 2017. Rata-rata produksi perikanan tangkap dari tahun 2017 sebesar 62.859. Sektor perikanan tangkap merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang banyak digeluti oleh masyarakat pesisir di Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan luas wilayahnya, memiliki rata-rata kepadatan stok ikan sebesar 1 ton/tahun dengan potensi perikanan laut sebesar 1.026.599 ton/tahun (WPP 713) Potensi perikanan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 8. Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Provinsi Sulawesi Barat

No.	Jenis Ikan	Potensi (ton)	Tingkat Pemanfaatan
1	Ikan Pelagis Kecil	104.546	0.61
2	Ikan Pelagis Besar	419.342	0.86
3	Ikan Demersal	77.238	1.04
4	Ikan Karang	365.420	0.34
5	Udang Penaeid	37.268	1.70
6	Lobster	1.020	1.40

7	Kepiting	5.016	1.59
8	Rajungan	6.740	1.52
9	Cumi - cumi	10.010	1.70
	Total	1.026.599	

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemnfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Capaian IKU 2: Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya di Sulawesi Barat (%)

Peningkatan produksi perikanan budidaya yang ditargetkan 135.204.813,78 ton dan capaian pada tahun 2021 adalah sebesar 132.910.535,00, yang artinya tidak mencapai nilai yang di targetkan. Namun tetap mengalami peningkatan sebesar 0,27%. Kegagalan pencapaian target ini disebabkan oleh beberapa faktor yang telah dievaluasi :

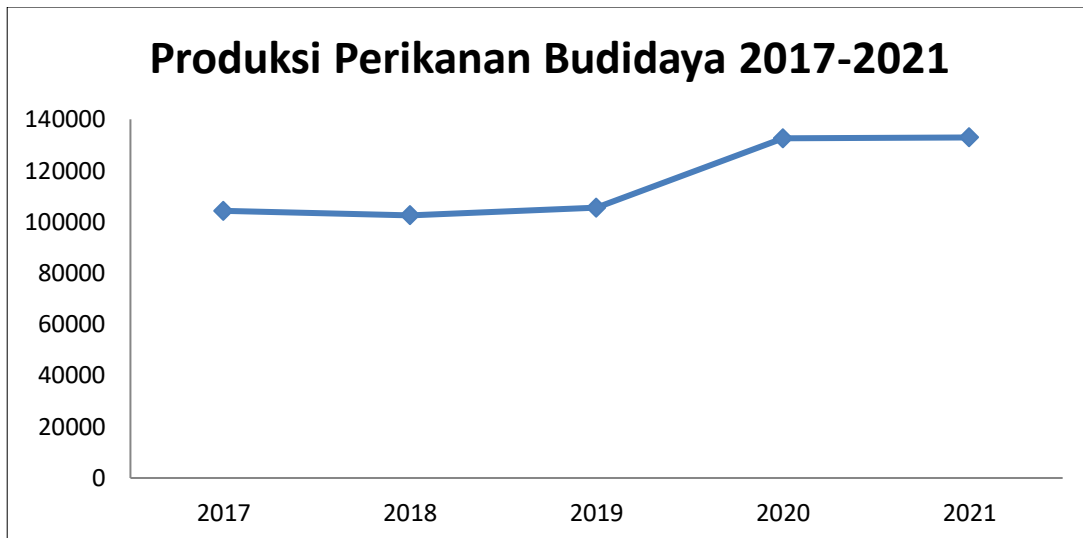
- Hama dan penyakit komoditas budidaya yang masih belum dapat teratasi karena keterbatasan penggunaan teknologi dan riset di provinsi Sulawesi Barat.
- Benca alam menyebabkan terhambatnya produksi perikanan budidaya salah satunya rusaknya fasilitas produksi dan kesulitan untuk mendapatkan bahan untuk produksi budidaya.
- Komoditas udang vaname mengalami trend penurunan produksi yang disebabkan, kemampuan lingkungan budidaya sudah mengalami penurunan karena penggunaan pakan yang tidak terkontrol dan bahan kimia.

Tabel 9. Capaian IKU-1 Produksi Perikanan Budidaya

Sasaran Strategis	Terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif bertanggung jawab dan berkelanjutan					
IKU-2	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya di Sulawesi Barat (%)					
Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			Renstra DKP (Tahun 2017-2022)		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target tahun 2022	Realisasi s/d Th 2022	Tingkat Kemajuan
29,32%	2%	0,27%	13,46%	2,09%	0,27	12,85

Budidaya perikanan di wilayah pesisir Sulawesi Barat umumnya memanfaatkan ikan pada tambak/empang, kolam, keramba, sawah, dan jaring apung dan jarring tancap. Komoditi utama yang dibudidayakan di pesisir Sulawesi Barat adalah ikan bandeng, udang windu, udang vaname, dan rumput laut serta jenis ikan air tawar seperti ikan mas, lele, nila dan mujair. Potensi produksi budidaya perikanan di Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana terlihat pada Gambar berikut:





Gambar 3. Perkembangan Produksi (ton) Budidaya Perikanan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2021

Perkembangan produksi perikanan budidaya di Sulawesi Barat menunjukkan cenderung meningkat untuk kurun waktu tahun 2017-2021. Rata-rata peningkatan produksi sebesar 3% untuk kurun waktu tahun 2017-2021.

Upaya yang telah dan terus akan dilakukan sebagai solusi tindak lanjut atas permasalahan tersebut di atas untuk meningkatkan Produksi Perikanan adalah :

1. Pemberlakuan sertifikasi hasil tangkapan ikan (catch certificate),
2. Pembangunan dan penyempurnaan fasilitas di Pelabuhan Perikanan,
3. Pemberdayaan kelompok nelayan melalui kegiatan pelatihan, bimtek, penyediaan mata pencaharian alternatif bagi wanita/istri nelayan
4. Pemberian paket hibah alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan (Jaring, GPS, mesin tempel, fish finder, pancing).
5. Pemenuhan kebutuhan akan komoditas ikan laut dilakukan dengan cara pengembangan budidaya laut.
6. Penyediaan benih dan calon induk unggul
7. Antisipasi kenaikan pakan ikan dengan pemberian bantuan sarana produksi pakan ikan
8. Memperkuat peran unit pelayanan teknis bidang budidaya perikanan



Gambar 2. Pelatihan teknologi budidaya bioflok



Gambar 3. Pemberian Paket Bantuan Perahu Sandeq

Angka Konsumsi Ikan merupakan jumlah kebutuhan/permintaan ikan yang menggambarkan fungsi dari jumlah penduduk dan neraca permintaan ikan untuk konsumsi domestik. Dalam hal ini, menghitung Angka Konsumsi Ikan berdasarkan data yang diterbitkan oleh BPS, dengan komponen yang dihitung mencakup konsumsi dalam rumah tangga (ikan dan udang segar/basah, ikan dan udang awetan, makanan jadi dan kelompok bumbu-bumbuan), konsumsi di luar rumah tangga (konsumsi di restoran, rumah makan, hotel, lapas, rumah sakit, dan sekolah), dan konsumsi ikan olahan seperti baso ikan, nugget, somay, pempek, kerupuk ikan, dll.

Tabel 11. Capaian IKU-2 Konsumsi Ikan

Sasaran Strategis	Terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif bertanggung jawab dan berkelanjutan						
IKU-3	Persentase peningkatan konsumsi ikan di Sulawesi Barat %						
Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021				Kenaikan 2020-2021 (%/Tahun)	Renstra DKP (Tahun 2017-2022)	
	Target	Realisasi	% Capaian	Target tahun 2022 (kg/Kap)		Realisasi s/d Th 2021 (kg/Kap)	Tingkat Kemajuan
1%	0,5%	0,76%	1000%	20%	61,05	64,64*	121%

*

Capaian Angka Konsumsi Ikan tahun 2021 adalah 64,64 kg/kapita/tahun mengalami peningkatan sebesar 0,76% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang besarnya 64,15 kg/kapita/tahun. Capaian tahun 2021 telah memenuhi target sebesar 64,47 kg/kapita/tahun. Apabila dibandingkan dengan target akhir dalam Renstra DKP Tahun 2017- 2022, yang besarnya 49,64 kg/kapita/tahun, maka capaian tahun 2019 telah melebihi dari target yaitu sebesar 120 persen. Secara umum capaian sasaran ini telah dapat dicapai dengan sangat baik, dengan persentase tingkat capaian telah melebihi 100%.

Meningkatnya tingkat konsumsi ikan di Provinsi Sulawesi Barat ini juga tidak lepas dari gencarnya kampanye GEMARIKAN oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat yang didukung penuh pemerintah daerah dan merupakan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya makan ikan dalam rangka peningkatan status gizi masyarakat untuk membentuk bangsa yang sehat, kuat dan cerdas.





Jika dibandingkan dengan angka konsumsi ikan nasional tahun 2021 sebesar 64,64 kg/kapita/tahun, nilai konsumsi ikan di Provinsi Sulawesi Barat sudah melebihi capaian konsumsi ikan nasional yakni 50,69 kg/kapita/tahun. Peningkatan konsumsi ikan diharapkan bisa menekan kasus gizi ganda (kelebihan dan kekurangan gizi), stunting (bayi lahir pendek) dan beberapa kasus lain yang erat kaitannya dengan masalah pangan dan gizi.

Peningkatan konsumsi ikan menunjukkan bahwa daya serap atau permintaan pasar komoditas perikanan semakin tinggi, sehingga produksi perikanan semakin baik terserap oleh pasar. Disamping itu, peningkatan konsumsi ikan menunjukkan perubahan pola konsumsi dalam masyarakat, komoditas perikanan mulai menjadi salah satu sumber protein dan pangan di Indonesia. Berdasarkan preferensi konsumen di Indonesia, komoditas ikan yang dikonsumsi terdiri dari ikan segar, kelompok ikan dalam makanan jadi dan ikan asin. Presentase komoditas ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia adalah 76 persen komoditas ikan segar 76 persen; 19 persen merupakan Kelompok Ikan dalam Makanan Jadi (KIMJ) 19 persen; dan 15 persen merupakan ikan asin diawetkan.

Ikan sebagai salah satu sumber protein hewani utama bagi masyarakat merupakan komponen penting dalam mewujudkan sistem ketahanan pangan. Terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan kesadaran terhadap gizi dan kesehatan menyebabkan tingkat konsumsi ikan per kapita menjadi meningkat. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri terutama dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani maka pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat harus dapat menjaga ketersediaan ikan secara berkelanjutan.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan konsumsi ikan antara lain:

1. Pameran dan Bazar produk perikanan 2 kali yang diisi sejumlah kegiatan seperti bazar produk perikanan dari beberapa usaha mikro, kecil dan menengah
2. Pengembangan kelembagaan pemasaran
3. Pengembangan sistem rantai dingin

Faktor yang menjadi penyebab kenaikan konsumsi ikan antara lain:

1. Terjadinya Terjadinya pergeseran pola konsumsi masyarakat dari daging merah ke daging putih atau ikan;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kandungan gizi dan manfaat makan ikan bagi kesehatan dan kecerdasan;
3. Tersedianya aneka produk olahan ikan yang bermutu dan menu berbasis ikan yang memudahkan masyarakat dalam mengkonsumsi ikan;
4. Ketersediaan dan keterjangkauan produk perikanan semakin luas sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan produk perikanan.
5. Penyediaan sarana prasarana pemasaran (pasar ikan bersih dan sentra kuliner) yang representatif dalam rangka mendukung penyediaan ikan kepada masyarakat.

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja konsumsi ikan adalah:

1. Beberapa wilayah masih kebiasaan masyarakat untuk makan ikan yang rendah,
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi dan manfaat protein ikan bagi kesehatan dan kecerdasan,
3. Rendahnya suplai ikan di beberapa wilayah,
4. Sarana pemasaran dan distribusi masih terbatas,
5. Diversifikasi produk hasil perikanan yang bisa memenuhi tuntutan konsumen masih belum berkembang.

Guna mendukung peningkatan konsumsi ikan, telah diinisiasi berbagai program/kegiatan pembangunan, yaitu :



Gambar 3. Bantuan Hibah Box Pendingin Bagi Pemasar Ikan

1. Menjamin ketersediaan produk hasil perikanan dengan kualitas baik (supply), dengan cara pengadaan sarana sistem rantai dingin (*Chest Freezer dan Thermal Ice Gel*).
2. Mendorong peningkatan konsumsi produk hasil perikanan (*consumtion*), dengan cara promosi melalui bazar produk perikanan dan lomba memasak menu ikan
3. Meningkatkan keanekaragaman produk olahan hasil perikanan untuk memenuhi tuntutan selera konsumen.



Gambar 4. Bantuan Hibah Motor Pemasar Ikan

SASARAN STRATEGIS : TERSEDIANYA PENGELOLAAN RUANG LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL SULAWESI BARAT

Keberhasilan sasaran strategis ini di ukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu Peningkatan pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Barat (Kawasan). Peningkatan pengelolaan ruang laut pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Barat (Kawasan) adalah total dari kegiatan yang mencakup pengelolaan ruang laut di kawasan yang termasuk dalam kawasan ruang laut hingga 12 mill, pesisir dan pulau pulau kecil. Capaian kinerja sasaran strategi di gambarkan dalam table dibawah.

Tabel 12. Capaian IKU-3 Peningkatan pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Barat

Sasaran Strategis	Terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif bertanggung jawab dan berkelanjutan							
IKU-4	Peningkatan pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Barat (Kawasan)							
Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021				Kenaikan 2020-2021 (%/Tahun)	Renstra DKP (Tahun 2017-2022)		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target tahun 2022 (kg/Kap)		Realisasi s/d Th 2021 (Kawasan)	Tingkat Kemajuan	
6 Kawasan	5 Kawasan	6 Kawasan	120%	Tidak ada kenaikan	5 Kawasan	6 Kawasan	120%	

Pada tahun 2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau pulau kecil dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana penunjang. Jumlah kawasan yang dikelola yaitu sebanyak 6 kawasan yang tersebar di 2 kabupate yaitu Polewali Mandar, Mamuju dan majene, capaian ini mencapai target indikator yang ditetapkan.



SASARAN STRATEGIS : TERSEDINYA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG PROFESIONAL DAN PARTISIPATIF

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentasi penanganan kegiatan IUU fishing, destruktif dan pelanggaran usaha perikanan (%). Nilai kinerja Persentasi penanganan kegiatan IUU fishing, destruktif dan pelanggaran usaha perikanan (%) dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku diperoleh dari perbandingan jumlah kegiatan yang telah terselesaikan 2021 dengan jumlah kegiatan yang dilakukan tahun 2021. Dalam hal ini, jumlah kegiatan yang dihitung adalah kegiatan yang ditangani oleh PPNS Perikanan yang ada di UPT/Satker Pengawasan SDKP maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Tabel 13. Capaian IKU-4 Persentasi penanganan kegiatan IUU fishing, destruktif dan pelanggaran usaha perikanan

Sasaran Strategis	Tersedianya Pengendalian Dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Yang Profesional Dan Partisipatif							
IKU-5	Persentasi penanganan kegiatan IUU fishing, destruktif dan pelanggaran usaha perikanan (%)							
Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021				Kenaikan 2020-2021 (%/Tahun)	Renstra DKP (Tahun 2017-2022)		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target tahun 2022 (kg/Kap)		Realisasi s/d Th 2021 (%)	Tingkat Kemajuan	
73%	100%	99,21%	99,21%	26,21%	100	91%	91%	

Persentasi penanganan kegiatan IUU fishing, destruktif dan pelanggaran usaha perikanan mengalami peningkatan dari 73% pencapaian kegiatan menjadi 99,21%, hal ini disebabkan ada sebagian kegiatan yang kaitannya mengenai pengembangan sarana dan prasarana pengawasan yang tidak terlaksana, namun dari segi indikator pendukung semua target mencapai, salah satunya jumlah hari operasional kapal perikanan dari target 30 tercapai 35 dan jumlah pokmaswas yang dibina mencapai target 17 dari target 17. Pelaksanaan kegiatan operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan melibatkan unsur petugas PSDKP Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulbar, Satwas PSDKP, PPNS, KKP. Selama melakukan operasi pengawasan masih ada ditemukan nelayan yang tidak membawa SIPI, SLO saat berlayar. Untuk itu pengawas perikanan memberikan pembinaan serta arahan kepada nelayan agar melengkapi administrasi sebelum melakukan kegiatan penangkapan di laut. Selain nelayan yang ditemukan tidak lengkap administrasi melakukan aktifitas dilaut, ditemukan juga kondisi pesisir pantai yang kotor akibat sampah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat sekitar. Hal ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan perairan. Yang mendukung indikator ini terdiri atas 2 kegiatan utama yaitu jumlah operasional kapal pengawasan dan jumlah pokmaswas yang dibina.

Tabel 14. Jumlah kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP

Jumlah kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP (Kelompok)		Tahun 2021		Target 2022
Tahun 2019	Tahun 2021	Jumlah Pokmaswas	% Kenaikan 2020-2021	
10	17	17	Tidak ada Kenaikan	20

Upaya yang telah dan terus akan dilakukan adalah sosialisasi kepada nelayan mengenai administrasi kapal yang harus dilengkapi sebelum berlayar. Peran pengawasan dan fungsi penegakan hukum bidang perikanan dan kelautan oleh Pengawas Perikanan meliputi kegiatan penangkapan, pembudidaya, dan pengolahan hasil perikanan, serta pengangkutan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan, aspek konservasi, penelitian dan pengembangan termasuk pemanfaatan plasma nutfah, juga antisipasi dampak kerusakan sumberdaya ikan maupun wabah hama dan penyakitnya. Walau kenyataannya masih sulit diterapkan akibat kendala ego struktural maupun kebijakan "selera" pimpinan terkait perijinan yang diawasi contohnya. Selanjutnya dalam konteks kelautan dan perikanan, pengawasan mencakup tiga aspek yakni sebagai suatu kegiatan, pengendalian, dan tindakan, atau penjabaran pengawasan berdasarkan FAO (Food and Agriculture Organization) adalah dilaksanakannya sistem MCS berupa Monitoring (Pemantauan), Controlling (Pengendalian) dan Surveillance (Operasi Lapangan). Pengawasan sebagai suatu kegiatan berupa pemantauan (monitoring) adalah pengumpulan data, fakta dan informasi tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan berikut analisa dan perencanaan secara langsung maupun tidak langsung. Sementara pengawasan sebagai pengendalian (controlling) merupakan pencegahan awal (preemptive), dapat dengan proses perijinan, pemeriksaan atau verifikasi, maupun pengaturan larangan berikut sosialisasi dan pembinaannya (persuasive). Kemudian pengawasan berupa tindakan (surveillance), untuk mewakili tupoksi adalah penanganan, pemberian sanksi atas pelanggaran guna menimbulkan efek jera atau kesadaran taat aturan, antara lain melalui operasi lapangan hingga penertiban (responsive).

Kegiatan Pengawasan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Barat hingga kini masih mengutamakan pengendalian dalam bentuk preventive dan persuasif, dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum terutama melibatkan masyarakat lokal. Antara lain melalui program Sistem Pengawasan Perikanan Berbasis Masyarakat berupa pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dalam rangka mengantisipasi keterbatasan jumlah pengawas DKP dibandingkan wilayah kerja pengawasan. Sekaligus mengkomodir tata cara dan kearifan setempat (local wisdom), sehingga diharapkan unsur

penindakan (responsive) sebagai upaya terakhir menjadi lebih efektif sekaligus tidak memberatkan anggaran.

Sebagai penunjang kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan telah terdapat Kapal Pengawas Perikanan sebagai aset untuk memudahkan koordinasi pengawasan berupa operasi terpadu dengan tingkat kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat sesuai kewenangan.

Tabel 15. Capaian Jumlah Hari Operasional Kapal Pengawasan

Jumlah hari operasional kapal Pengawas (Hari)			Tahun 2021	
Tahun 2019	Tahun 2020	Jumlah hari	% Kenaikan 2020-2021	Target Nasional
55	25	30	20%	180 Hari

Diharapkan kehadiran sarana kapal pengawas perikanan dapat lebih memastikan para pelaku usaha dan kegiatan perikanan untuk mematuhi segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan, demi kelestarian sumber daya perikanan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakatnya hingga peningkatan kontribusi ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Barat.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya keuangan dari anggaran APBD untuk pencapaian sasaran adalah sebesar 43.024.890.132,00-.atau 79,93% dari total pagu sebesar 34.984.887.904,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 18,12% dari Pagu yang ditentukan.

Pagu anggaran	Penggunaan anggaran	Iku Tercapai	Efisiensi Penggunaan sumber daya
Rp. 43.770.757.633	Rp. 34.984.887.904	4/6	20,07%

B. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan merupakan sarana pengukuran dalam alokasi dana yang mendukung pencapaian sasaran dengan indikator sasaran program dan pencapaian kegiatan dengan indikator kinerja, meliputi output dan outcome. Pengukuran pencapaian kinerja keuangan berdasarkan persentase rata-rata realisasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun jumlah anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 adalah sebesar Rp 43.770.757.633,- dengan realisasi penyerapan Rp. 34.984.887.904,- atau sebesar 79,93%. Rincian realisasi penyerapan anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 16. Jumlah Anggaran dan Realisasi Penyerapan Tahun 2021

No.	Program	Pagu Anggaran	SP2D	Persentase Pencairan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	96.045.040	90.233.040	93,95%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.634.496	8.623.500	99,87%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.553.200	3.532.000	99,40%
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DKA-SKPD	9.149.000	6.749.000	73,77%
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DKA-SKPD	3.655.000	3.645.000	99,73%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.935.600	6.735.600	61,59%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.713.600	38.268.600	78,56%
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.516.485.095	6.390.401.387	98,07%
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.634.352	4.600.352	99,27%
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	34.565.520	34.211.770	98,98%
11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	54.605.440	54.509.273	99,82%
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.758.200	4.758.200	100,00%
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.020.000	39.020.000	100,00%
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.200.000	7.200.000	100,00%
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.071.600	4.146.001	58,63%
16	Penyediaan Bahan/Material	64.567.659	64.565.720	100,00%
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	437.434.475	435.689.575	99,60%
18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	928.623.403	375.174.550	40,40%
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	87.302.700	83.819.700	96,01%
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.165.561	46.821.541	81,91%
21	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	114.200.000	109.549.000	95,93%
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.765.000	39.892.000	97,86%
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.100.000	188.540.875	94,22%
24	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	434.819.320	431.506.255	99,24%
25	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	99.289.362	38.449.096	38,72%
26	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	70.417.260	57.133.750	81,14%
27	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	963.243.298	811.665.350	84,26%
28	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	644.687.560	618.731.116	95,97%
29	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	4.176.666.197	3.712.774.926	88,89%

30	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	4.267.900.347	1.914.060.625	44,85%
31	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	99.877.960	74.809.600	74,90%
32	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	66.860.770	12.253.550	18,33%
33	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	98.647.715	70.543.126	71,51%
34	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	3.838.221.690	2.936.267.059	76,50%
35	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	40.800.124	15.849.902	38,85%
36	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	80.668.800	72.407.330	89,76%
37	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	39.081.430	38.612.200	98,80%
38	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	336.947.600	326.573.350	96,92%
39	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.505.968.175	1.479.482.225	98,24%
40	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.089.303.190	1.939.858.183	92,85%
41	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1.148.636.969	1.137.545.820	99,03%
42	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	198.242.780	178.873.730	90,23%
43	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	4.484.289.786	4.449.279.369	99,22%
44	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	75.394.000	65.260.000	86,56%
45	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.919.400	22.487.000	44,16%
46	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	602.345.235	403.731.154	67,03%
47	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	77.150.696	76.416.000	99,05%
48	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	218.357.976	209.935.224	96,14%
49	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah	9.282.835.052	5.849.695.280	63,02%

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah	43.770.757.633	34.984.887.904	79,93%
--	--------	----------------	----------------	--------

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan anggaran diantaranya: Proses pengadaan barang dan jasa masih terjadi banyaknya gagal lelang sehingga menyebabkan mundurnya waktu pelaksanaan kontrak serta adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang disebabkan oleh kendala teknis di lapangan, seperti banjir, cuaca buruk, kesulitan tenaga kerja, dll.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang peningkatan kesejahteraan pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 adalah sebesar Rp 43.770.757.633,- dengan realisasi penyerapan Rp. 34.984.887.907,- atau sebesar 79.93%.

Beberapa IKU yang belum dapat mencapai target, lebih disebabkan adanya kendala teknis dan pengaruh faktor alam, serta kondisi perekonomian global dan pandemi COVID-19. Permasalahan yang mempengaruhi pencapaian target tersebut selanjutnya akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Memperhatikan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya dan dalam rangka upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja akan menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya. Untuk itu beberapa rekomendasi dan strategi tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain:

1. Memfungsikan monitoring dan evaluasi secara langsung terhadap sasaran sehingga setiap hambatan atau kendala yang mungkin timbul dapat diantisipasi lebih dini;



2. Dalam hal keterbatasan sarana dan prasarana produksi dapat dilakukan dengan memprioritaskan pengalokasian dana untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga pencapaian sasaran dapat terpenuhi;
3. Meningkatkan kerjasama antara pengawas perikanan dan kelautan provinsi, kabupaten/kota dengan aparat penegak hukum dalam penanganan pelanggaran/tindak pidana perikanan serta mediasi penyelesaian konflik nelayan; dan
4. Mendorong industri kecil dan menengah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk olahan melalui pelaksanaan bimtek, pelatihan dan sosialisasi terkait pengendalian mutu, keamanan hasil olahan, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan sumberdaya manusia.
5. Dalam hal kinerja penyerapan anggaran agar setiap unit kerja/satker agar lebih disiplin melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta memperhatikan efisiensi setiap pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan, masih dirasakan belum pada taraf sempurna dan mungkin belum dapat memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil keputusan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di masa yang akan datang sangat kami harapkan.

Demikian laporan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 yang dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan penyusunan perencanaan dan meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.



LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA ESELON 2 TAHUN 2021
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Alamat : Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
Telp/Faks. (0426) 2325113 Mamuju 91512, e-mail : dkpsulbar@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **DR.IR. FADLI SYAMSUDIN, M.SC.**
Jabatan : **Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. M. ALI BAAL MASDAR**
Jabatan : **Gubernur Sulawesi Barat**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Februari 2021

Pihak Kedua,

Gubernur Sulawesi Barat

H. M. ALI BAAL MASDAR

Pihak Pertama,

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

DR.IR. FADLI SYAMSUDIN, M.SC.
NIP. 196607041994121005

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Stakeholder Perspective			
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan	Persentase Peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Per Tahun di Sulawesi Barat	1,2%
Customer Perspective			
3	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif bertanggung jawab dan berkelanjutan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Sulawesi Barat	2 %
		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Sulawesi Barat	1 %
		Persentase Peningkatan Produk Olahan di Sulawesi Barat	2%
		Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan di Sulawesi Barat	0,5%
Internal Process Perspective			
2	Tersedianya Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Cakupan Kawasan Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Sulawesi Barat	3 Kawasan
4	Tersedianya Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Profesional dan Partisipatif	Persentase Penanganan Kegiatan IUU Fishing, Destruktif dan Pelanggaran Usaha Perikanan	100%
Learning & Growth Perspective			
5	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	100%
6	Meningkatnya Pengelolaan Tata Laksana Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai SAKIP Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan	80
7	Meningkatnya Pengelolaan Data/Informasi Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan	Tingkat Dukungan Mutu Data Sektor dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan	3 Skala Likert
8	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 8.353.549.251	APBD
2. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Rp. 2.029.679.630	APBD
3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp.18.300.998.238	APBD
4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 4.167.557.675	APBD
5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan perikanan	Rp. 4.848.872.475	APBD
6. Program Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	Rp. 493.019.000	APBN
7. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 441.326.000	APBN
8. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 868.600.000	APBN
9. Program Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp. 190.750.000	APBN
10. Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp. 158.702.000	APBN
11. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Rp. 279.000.000	APBN
TOTAL ANGGARAN	Rp. 40.132.054.269	

Pihak Kedua
Gubernur Sulawesi Barat



H. M. ALI BAAL MASDAR

Pihak Pertama
Kepala Dinas



DR.IR. FADLI SYAMSUDIN, M.SC.
NIP. 196607041994121005



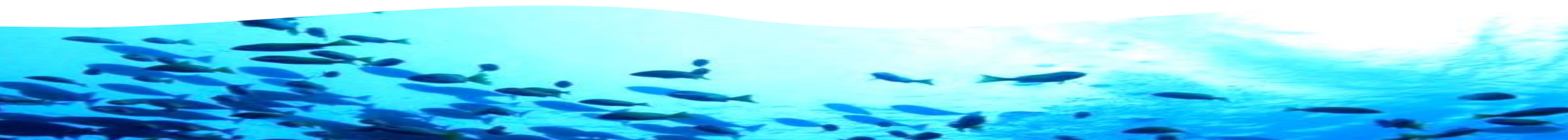
REVIEW MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2017-2022

Pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022

VISI :SULAWESI BARAT MAJU DAN MALAQBI			
MISI I : Membangun sumber daya manusia berkualitas, berkepribadian dan berbudaya			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas ASN Untuk Penerapan Pemerintahan yang Baik	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kualitas Kompetensi ASN Untuk Perwujudan Pemerintahan yang Terpercaya 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kinerja Aparatur Sipil Negara 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kinerja Aparatur Sipil Negara
MISI II : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, modern dan terpercaya			
Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas ASN Untuk Penerapan Pemerintahan yang Baik	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Untuk Perwujudan Pemerintahan yang Akuntabel dan Efektif 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Meningkatkan Dukungan Sistem Data dan Informasi Terintegrasi Menuju Good Governance 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Meningkatkan Dukungan Sistem Data dan Informasi Terintegrasi Menuju Good Governance
MISI III : Membangun dan menguatkan konektivitas antar wilayah berbasis unggulan strategis			
Mengoptimalkan pembangunan dan pengelolaan berbasis pengembangan wilayah kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya tata kelola Pelabuhan yang berdaya saing dan berkelanjutan Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana serta SDM yang profesional terhadap produk kelautan dan perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> Penatakelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan peran unit pelaksana teknis dinas (UPTD) Dukungan ketersediaan sarana dan prasarana yang bermutu dan terjangkau
MISI IV : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berdaya saing tinggi			
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan Meningkatnya produksi hasil kelautan dan perikanan Meningkatnya hasil pemasaran produk kelautan dan perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan Peningkatan efisiensi usaha kelautan dan perikanan Perbaikan mutu dan daya saing produk kelautan dan perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pengembangan usaha bidang perikanan dengan memperhatikan komoditas unggulan dan tetap menjaga kelestarian sumberdaya perikanan Penataan kelembagaan dan tata kelola usaha dan kelompok masyarakat Diversifikasi produk kelautan dan perikanan Pemanfaatan potensi unggulan lokal Inovasi produksi kelautan dan perikanan potensi ekspor Pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan produktifitas masyarakat kelautan dan perikanan

MISI V : Mengarustamakan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan

- Mengoptimalkan pembangunan dan pengelolaan berbasis pengembangan wilayah kelautan dan perikanan
- Meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan
- Meningkatnya luas kawasan konservasi perairan
- Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang profesional dan partisipatif
- Peningkatan luas kawasan konservasi perairan
- Peningkatan sistem pengawasan yang terpadu dan partisipatif yang dimaknai dengan adanya koordinasi antara aparatur terkait denganmelibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan serta menggunakan Sistem MCS (Monitoring, Controlling Surveilance) yang mumpuni
- Peningkatan luas kawasan konservasi perairan
- Peningkatan dan pengelolaan serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang mumpuni



Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan	Peningkatan pendapatan nelayan 1,5% per tahun (Rp.juta/kapita/thn)	1.425.000	1.446.375	1.468.071	1.490.092	1.512.443
			Peningkatan pendapatan pembudidaya ikan 1,5% per tahun (Rp.juta/kapita/thn)	1.750.000	1.776.250	1.802.894	1.829.937	1.857.386
			Peningkatan pendapatan hasil olahan produk KP sebesar 1% per tahun (Rp.juta/kapita/thn)	1.366.807	1.380.475	1.518.522	1.670.374	1.837.411
	Meningkatnya produksi hasil kelautan dan perikanan	Meningkatnya produksi hasil kelautan dan perikanan	Peningkatan produksi perikanan tangkap 2,5% per tahun (ton)	67.552	70.929	75.984	81.207	88.516
			Peningkatan produksi perikanan budidaya 2,5% per tahun (ton)	127.733	143.507	153.553	167.373	175.742
			Peningkatan produk olahan hasil kelautan dan perikanan sebesar 1% per tahun (ton)	4.029	4.069	4.110	4.151	4.193
	Meningkatnya hasil pemasaran produk kelautan dan perikanan	Meningkatnya hasil pemasaran produk kelautan dan perikanan	Peningkatan konsumsi ikan 0,5% per tahun (kg/kapita/thn)	48,67	48,91	49,15	49,39	49,64
			Peningkatan jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang berdaya saing	1	2	5	10	15
			Peningkatan jumlah UMKM dan UPI yang tersertifikasi	1	1	2	5	10
2.	Mengoptimalkan pembangunan dan pengelolaan berbasis pengembangan wilayah kelautan dan perikanan	Meningkatnya luas kawasan konservasi perairan	Peningkatan luas kawasan konservasi perairan sebesar 10% selama 5 tahun (ha)	297.307	327.038	359.741	395.716	435.287
			Peningkatan pendapatan daerah dari sektor wisata bahari sebesar 1% per tahun (% dr tahun sebelumnya)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana serta SDM yang profesional terhadap produk kelautan dan perikanan	Terselenggaranya tata kelola pelabuhan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan	Peningkatan armada penangkap ikan yang moderndi perairan umum sebesar 0,1% per tahun (% thn sebelumnya)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
			Peningkatan teknologi budidaya tambak tingkat madya dan maju sebesar 1% per tahun (% thn sebelumnya)	1	1	1	1	1
			Peningkatan penyerapan tenaga kerja bidang kelautan dan perikanan sebesar 1,5% per tahun (% thn sebelumnya)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
			Penambahan jumlah kapal patroli unit per tahun		1	1		1
3.	Meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang profesional dan partisipatif	Peningkatan jumlah Pokwasmas yang berperan aktif dalam pengawasan sumberdaya KP sebesar 5kelompok per tahun	40	60	100	140	200

		Penurunan angka pelaku <i>illegal fishing</i> dan <i>destructive fishing</i> sebesar 80% selama 5 tahun	20	40	60	70	80	
		Berkurangnya pelaku perusakan lingkungan sebesar 70% selama 5 tahun	50	55	65	70	80	
	Tersedianya kebijakan kelautan dan perikanan yang bersifat implementatif	Penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu (%)	16.6	30	60	80	100	
		Rasio jumlah armada perikanan yang beroperasi sesuai aturan terhadap total armada perikanan (%)	70	75	80	85	90	
4.	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas ASN Untuk Penerapan Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Untuk Perwujudan Pemerintahan yang Akuntabel dan Efektif	Jumlah SOP yang telah dibuat dan diimplementasikan pada layanan	5	10	12	15	20
		Terlaksananya pemeliharaan rutin dan sarana pendukung perkantoran (%)	100	100	100	100	100	
		Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan yang memenuhi standar (%)	100	100	100	100	100	
	Meningkatnya Kualitas Kompetensi ASN Untuk Perwujudan Pemerintahan yang Terpercaya	Meningkatnya jumlah apatur yang bekerja sesuai kompetensinya (%)	92	94	96	98	100	
		Meningkatnya kehadiran aparatur minimal 80% setiap bulan	80	83	86	90	95	

